



Penerapan E-Government dalam Tata Kelola Kearsipan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Syahrhan Lamusu^{1*}, Ismet Sulila², Sri Yulianti Mozin³

¹⁻³ Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lamususyahrhan@gmail.com¹

Abstract. *This study explores the implementation of e-Government within the context of Bawaslu (Election Supervisory Agency) and its impact on governance and public trust. The results reveal that, from the support aspect, the success of e-Government implementation is largely driven by the commitment of leadership, which provides essential policies, human resources (HR) training, and technological facilities. However, challenges remain in terms of limited infrastructure and budget constraints at the district and city levels. Regarding the capacity aspect, Bawaslu already possesses competent HR, particularly among the younger generation, and adequate infrastructure. Nevertheless, there is still a need for improvement in the distribution of employee capabilities through continuous training and mentoring. Lastly, from the value perspective, e-Government has proven to deliver tangible benefits, such as increased efficiency, transparency, accountability, and an enhanced public trust in the institution. However, further efforts are required in areas such as system socialization, maintenance, and data security to maximize these benefits. This research highlights the importance of continuous development in both human and technological resources to ensure the optimal success of e-Government initiatives in enhancing governance and service delivery.*

Keywords: Archiving; Bawaslu; E-Government; Governance; HR Training.

Abstrak. Studi ini mengeksplorasi implementasi e-Government dalam konteks Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Hasilnya mengungkapkan bahwa, dari aspek dukungan, keberhasilan implementasi e-Government sebagian besar didorong oleh komitmen kepemimpinan, yang menyediakan kebijakan penting, pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas teknologi. Namun, tantangan tetap ada dalam hal keterbatasan infrastruktur dan kendala anggaran di tingkat kabupaten dan kota. Mengenai aspek kapasitas, Bawaslu telah memiliki SDM yang kompeten, terutama di kalangan generasi muda, dan infrastruktur yang memadai. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk peningkatan dalam distribusi kemampuan pegawai melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Terakhir, dari perspektif nilai, e-Government telah terbukti memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan di bidang-bidang seperti sosialisasi sistem, pemeliharaan, dan keamanan data untuk memaksimalkan manfaat ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan berkelanjutan pada sumber daya manusia dan teknologi untuk memastikan keberhasilan optimal inisiatif e-Government dalam meningkatkan tata kelola dan pemberian layanan.

Kata Kunci: Bawaslu; E-Government; Pelatihan SDM; Pengarsipan; Tata Kelola.

1. LATAR BELAKANG

Modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan di Indonesia. Administrasi publik dituntut untuk mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menjadi pendorong utama transformasi ini, sehingga pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong digitalisasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 serta pemanfaatan e-Government sebagai instrumen untuk mempercepat proses layanan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat transparansi. Di berbagai instansi pemerintahan, konsep Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) digunakan untuk mencapai tata kelola yang bersih, akuntabel, dan modern.

Digitalisasi arsip kemudian menjadi elemen strategis dalam implementasi e-Government, karena memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, serta akses data yang lebih efisien dan aman. Melalui proses alih media, dokumen fisik dikonversi menjadi format digital sehingga lebih mudah ditelusuri serta terhindar dari risiko kerusakan. Pemerintah juga membangun berbagai sistem informasi dan menerapkan standar keamanan data dengan enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Transformasi ini tidak hanya mendukung efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antarinstansi serta membuka akses informasi publik secara lebih luas melalui portal layanan digital.

Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai lembaga pengawas pemilu turut dituntut untuk mengikuti arus digitalisasi tersebut. Pengelolaan arsip yang baik sangat penting bagi Bawaslu karena arsip menjadi dasar dokumentasi dan evaluasi dalam pengawasan pemilu. Namun, implementasi e-Government di Bawaslu masih menghadapi kendala pada aspek support, capacity, dan value menurut Indrajit (2016). Keterbatasan infrastruktur dan anggaran, rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital, serta resistensi pegawai terhadap perubahan menjadi hambatan utama. Sementara itu, volume arsip yang meningkat signifikan dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menerapkan sistem kearsipan digital yang lebih terintegrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Government di lingkungan Bawaslu Gorontalo belum berjalan optimal, padahal digitalisasi arsip memberikan dampak besar terhadap efektivitas kerja, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan. Digitalisasi juga mendorong pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terukur sehingga meningkatkan kepuasan publik serta daya saing lembaga. Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti memandang perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi digitalisasi kearsipan di Bawaslu, yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul “Penerapan e-Government dalam Tata Kelola Kearsipan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.”

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi Publik

Perkembangan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, hukum, sosiologi, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, konsep administrasi publik harus selaras dengan ilmu lainnya. Administrasi publik menurut *Chandler & Plano* yang dikutip Harbani Pasolong dalam bukunya (*Buku Pengantar Administrasi Publik*, 2022). Menjelaskan bahwa: “Administrasi publik merupakan seni dan

ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Sedangkan menurut David H. Rosenbloom yang dikutip Harbani Pasolong dalam bukunya *Teori Administrasi Publik* (2019:8) menjelaskan bahwa: "Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian". Berdasarkan pemaparan teori dari para ahli diatas, maka administrasi publik adalah proses yang dilakukan pemerintah di bidang legislatif dan eksekutif dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah publik dalam melakukan pelayanan untuk kepentingan umum. Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah publik bisa mulai dari pembuatan suatu formulasi kebijakan, implementasi, pengawasan sampai pada evaluasi yang ditujukan untuk masyarakat umum. (Djani, 2022)

Good Governance

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih (Elvia et al., 2025).

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah

yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang *Good Governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri- industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan (Shafira & Kurniasiwi, 2021).

E-Government

E-government adalah kependekan kata dari *Electronic Government*. *E- government* merupakan salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan hingga pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem (Nugraha et al., 2023).

Heeks (2002) mendefinisikan secara luas *E-government* dapat didefinisikan sebagai penggunaan *Information and Communication Technologies (ICT)* untuk memperbaiki aktivitas organisasi pemerintahan. Pengertian yang senada diungkapkan juga oleh Devadoss dkk (2002) yang mendefinisikan *E-government* sebagai pemanfaatan *Information Technology (IT)* seperti mempermudah internet dan untuk mendukung, mengotomatisasikan transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah lainnya (Octavian et al., 2023).

Budi Rianto dkk (2012:36) dalam (Rusdi et al., 2022) menyimpulkan bahwa *E-government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi

pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan model trigulasi. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan Penerapan *e-government* Dalam Tata Kelola Kearsipan Pada Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang detail dan akurat (Mardianto, 2022).

Dalam melaksanakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Jenis penelitian ini adalah “Penerapan *e-government* Dalam Tata Kelola Kearsipan Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. penelitian ini juga mengamati dan menangkap secara factual dan aktual dunia nyata dan mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari yang dilihat dari indikator, *support*, *capacity*, dan *value*.

Saat melakukan pengumpulan data, peneliti berusaha untuk memperoleh data penelitian dan mengungkap secara objektif data yang diperoleh karena peneliti ingin mengungkap dengan benar dan objektif. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam dengan informan dari berbagai sumber seperti KORSUB SDM dan pegawai yang berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

4. HASIL

Dukungan/Support

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti melakukan observasi dan penelusuran dokumen dimana peneliti menemukan adanya kebijakan terintegrasi yaitu Bawaslu Provinsi Gorontalo menerapkan UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) melalui pengelolaan arsip digital yang sistematis dan berkelanjutan. Setiap surat disimpan dalam bentuk digital untuk menjaga keamanan dan keutuhan data. Penggunaan aplikasi SRIKANDI mendukung terciptanya tatakelola arsip yang efisien dan transparan.

Meskipun terdapat tantangan dalam kearsipan SDM dan anggaran, komitmen kelembagaan terhadap transformasi digital terus diperkuat melalui koordinasi dengan Bawaslu

RI dan penggunaan aplikasi resmi seperti SRIKANDI untuk memastikan keragaman pengelolaan arsip diseluruh tingkatan Lembaga.

Berdasarkan penjelasan temuan penelitian bahwa pimpinan Bawaslu sudah memberikan dukungan terhadap penerapan SRIKANDI melalui penetapan kebijakan dan penyediaan fasilitas teknologi namun masih terdapat halangan seperti anggaran.

Kapasitas/Capacity

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melakukan observasi dan dokumentasi dan memperoleh data bahwa dalam tata kelola kearsipan Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam aspek infrastruktur teknologi yang dimana terdapat aplikasi SRIKANDI yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola arsip.

Sebagian besar pegawai telah memahami penggunaan aplikasi kearsipan digital seperti SRIKANDI yang dinilai cukup mudah diakses dan efisien dalam menunjang kegiatan administrasi dan pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Aplikasi ini membantu proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian arsip menjadi lebih cepat dan terstruktur, sehingga meminimalisir penggunaan dokumen fisik serta mendukung sistem kerja berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pegawai yang memerlukan peningkatan kemampuan teknis terutama dalam mengoperasikan fitur-fitur lanjutan seperti klasifikasi arsip elektronik, pengunggahan dokumen dalam format tertentu, serta penggunaan tanda tangan digital yang terintegrasi

Nilai/Value

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melakukan observasi dan menemukan bahwa melalui digitalisasi arsip, proses administrasi dan pengelolaan dokumen menjadi lebih transparan, efisien, serta mudah ditelusuri, sehingga masyarakat dapat melihat akuntabilitas dan profesionalisme lembaga dalam menjalankan tugasnya. Penerapan *e-government* juga mempermudah akses informasi publik dan mempercepat proses pelayanan tanpa batasan ruang maupun waktu. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat kendala teknis dan kekhawatiran terhadap keamanan data, penerapan sistem digital ini secara keseluruhan berhasil memperkuat citra Bawaslu sebagai lembaga terbuka, mederen, dan berintegrasi tinggi dalam pengelolaan arsip dan informasi.

Pembahasan

Dukungan/Suport

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor *dukungan* atau *support* merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan penerapan e-Government.

Menurut Indrajit, dukungan harus mencakup kebijakan, manajerial, infrastruktur, dan sumber daya yang saling terintegrasi agar sistem pemerintahan berbasis digital dapat berjalan efektif. Hal ini tercermin dalam hasil penelitian di Bawaslu Provinsi Gorontalo yang menunjukkan adanya dukungan nyata dari pimpinan melalui kebijakan digitalisasi arsip, penyediaan fasilitas teknologi, pelatihan SDM, serta koordinasi terpusat dengan Bawaslu RI.

Temuan tersebut diperkuat oleh jurnal Ismet Sulila yang menegaskan bahwa keberhasilan inovasi berbasis teknologi, baik di sektor pemerintahan maupun masyarakat, sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM serta sarana prasarana yang memadai. Sejalan dengan itu, jurnal Bharoto & Lestari juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-surat di Desa Palimanan Timur berhasil karena adanya dukungan dari pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur, serta pengelolaan SDM yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital, baik dalam konteks pemerintahan maupun masyarakat, sangat ditentukan oleh dukungan komprehensif yang mencakup aspek kebijakan, sumber daya manusia, teknologi, dan manajerial sebagai fondasi utama terciptanya tata kelola elektronik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kapasitas/Capacity

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dalam jurnal Vanessa Aulia, dapat disimpulkan penerapan *e-Government* di Bawaslu Provinsi Gorontalo berlandaskan pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas organisasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, dan prosedur kerja secara efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu telah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet stabil, *server* penyimpanan data internal, dan penggunaan aplikasi kearsipan digital SRIKANDI, meskipun masih terdapat kendala pada pemerataan perangkat dan kompetensi SDM di tingkat kabupaten/kota. Temuan ini sejalan dengan pandangan Indrajit (2006) dan jurnal Vanessa Adelia Rosa Wardani dkk. (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan penerapan *e-Government* bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi pegawai, serta dukungan sumber daya yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kapasitas Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat dikatakan cukup baik, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek pemerataan kemampuan SDM dan optimalisasi perangkat agar implementasi *e-Government* dapat berjalan lebih maksimal dan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi serta efisiensi pelayanan publik.

Value/Nilai

Penerapan *e-Government* di Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menciptakan nilai positif yang

berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan citra kelembagaan, meskipun masih dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan sistem, dan keamanan data agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. dan kesimpulannya adalah nilai penerapan *e-Government* di Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan dampak nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya, namun tetap memerlukan penguatan teknis dan sumber daya untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat di seluruh tingkatan Lembaga

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Government* dalam tata kelola kearsipan di Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI yang mempermudah pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi arsip secara digital.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-government* di Bawaslu Provisinsi Gorontalo telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap efektivitas kerja dan pelayanan public, namun masih memerlukan penguatan pada aspek infrastruktur, kapasitas SDM, serta keberlanjutan dukungan teknis untuk memastikan implementasinya optimal di seluruh tingkatan Lembaga

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian hingga ke Tingkat bawaslu kabupaten/kota agar diperoleh Gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan e-government. Penelitian berikutnya juga dpaat menggunakan metode kuantitatif atau mixed method untuk menilai efektivitas dan dampak system digital secara lebih objektif, serta menyoroti aspek penting seperti keamanan data, integritas system, dan partisipasi public dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Bawaslu

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, M., & Rahmawati, R. (2024). Indrajit (2016:2). *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 2(2), 167-185. <https://doi.org/10.61332/antasena.v2i2.243>
- Aziz, R. A., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: Studi tentang pelayanan akta kelahiran melalui e-Lampid Kota Surabaya. *Journal of Office Administration: Education and Practice*, 2(3), 211-220. <https://doi.org/10.26740/joaep.v2n3.p211-220>
- Chapter, B. (2025). Strategi implementasi digital archive dalam meningkatkan efisiensi dan

- transparansi tata kelola koperasi: Sebuah kajian konseptual Agus Nugraha. 117-130.
- Djani, W. (2022). *Administrasi publik (teori dan pergeseran paradigma ke era digital)*. Zifatama Jawa.
- Efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan administrasi surat pada Kementerian Kesehatan. (2023). *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(2).
<https://doi.org/10.7454/jabt.v5i2.1076>
- Elvia, V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2025). The role of technology in achieving good governance: A public administration theory perspective. 5(1), 199-206.
<https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.400>
- Hilmi, M., Heru, M., Saiful, S., & Yuniarto, R. (2016). Pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan (Studi pada karyawan PT. Telkom Pusat Divisi Regional V Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol, 39(2).
- INDONESIA, B. P. P. U. R., & PERATURAN. (2020). *BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN*. 53-54.
- Iqbal, M. I., Manurung, F. E., Dongoran, S., Amalita, R., & Suhairi, S. (2022). Sistem informasi global dan riset pasar. *Journal of Social Research*, 1(6), 513-517.
<https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.111>
- Jurnal, B.: Perpustakaan, K., Informasi, D., Sinta Devina, A., Safii, M., Prasetyawan, A., & Ghazali, A. M. (n.d.). 220 | *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika>
- Lolytasari, L., & Dirsanala, A. (2023). Digitalisasi arsip dalam mendukung pelaksanaan e-government. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 15(1), 18-30. <https://doi.org/10.37108/shaut.v15i1.963>
- Mahsyar, A. (2011). *Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik: Vol. I*(Issue 2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Majid, J. (2021). Kontribusi teori contingency: Upaya mewujudkan good governance melalui e-government di Indonesia. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 186. <https://doi.org/10.24252/assets.v11i2.23810>
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2009). *Evaluasi Kinerja SDM*. Refika Aditama.
- Mendrofa, H. P., Supriadi, B., Yustiari, S. H., & Lubis, A. F. (2025). Analisis efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 8(1), 537-545. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6811>
- Monica Cristina Mangolo. (2024). Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu di Provinsi Gorontalo. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 276-286.
<https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.796>
- Murtadho, M. A. (2024). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1, 1-120.
- Muzni Hanipah, & Aryani, L. (2022a). Efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis e-government (Simpelin) di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 112-128. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4619>
- Muzni Hanipah, & Aryani, L. (2022b). Efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis e-government (Simpelin) di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus di Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 112-128. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4619>
- Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., & Larantika, A. A. A. D. (2021). Implementasi e-government dalam proses pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 85-96. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96>
- Nugraha, J. T., Achmad, T., Warsono, H., & Yuniningsih, T. (2023). E-government dalam perspektif pengguna: Konsep, teori, dan perkembangannya. *Stiletto Book*.
- Nur Rahmawati, D., Winata, H., & Sopyan Febrianto, A. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi Srikandi dan kualitas SDM dalam meningkatkan produktivitas pegawai di Arsip Nasional Republik Indonesia. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v23i1>
- Octavian, F., Susanti, E., & Bonti, B. (2023). E-government service quality pada online single submission risked based approach (Oss-Rba) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Sumedang. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 667. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45133>
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). *No Title*.
- Pradana, F. H. (2022). Penerapan e-government dalam pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Repository IPDN*, 1-17. <https://bit.ly/3tRIUNu>
- Pradipta, A. W., & Manuputty, A. D. (2022). Perancangan tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 2019 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. *Journal of Software Engineering Ampera*, 3(3), 153-169. <https://doi.org/10.51519/journalsea.v3i3.287>
- Puji Lestari, I., Moh Nazar Fajri, L., & Penelitian Abstrak, A. (2022). Analisis e-government dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Solusi Ilmiah Keijakan Dan Administrasi Publik*, 08, 10-23. www.Lomboktimurkab.go.id
- Rahmasari, E. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3307>
- Rahmawati, D. N., Winata, H., & Febrianto, A. S. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi Srikandi dan kualitas SDM dalam meningkatkan produktivitas pegawai di Arsip Nasional Republik Indonesia. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v23i1>
- Rosalia, N., Tahwali, J., Darmawati, U. T., Tadulako, U., Nawawi, M., Soekarno, J., No, H. K., Mantikulore, K., Palu, K., & Tengah, S. (2025). Umi Kalsum Dewi Hastuty Dandan Haryono. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 144-153. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i1.684>
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini. (2022). Analisis e-government dalam penerapan aplikasi Sapo Rancak di DPMPSTSP Kota Padang. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 26-48.
- Sarosa, S. (2021). *No Title*.
- Shafira, A., & Kurniasiwati, A. (2021). Implementasi e-government dalam upaya Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 52-68. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457>
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan

- pembangunan berkelanjutan: Reviu literatur sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44-58. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269>
- Sukatin, S., Nuraini, N., Azzahra, A. C., Yunita, F. R., Fransiska, S., & Nafi', T. (2022). Manajemen pelayanan publik di pendidikan tinggi. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 1(2), 70-78. <https://doi.org/10.55904/histeria.v1i2.272>
- Teressa, R., & Priambodo, B. (2025). Evaluasi penggunaan aplikasi Srikandi dalam efisiensi kinerja pegawai pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2).
- Wahana, N., Afifuddin, & Rahmawati, S. D. (2023). Efektivitas pengelolaan kearsipan di bagian pemerintahan sekretariat daerah Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 11(7), 1-7. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/21960>
- Zuhruf, A. (2024). Transformational leadership: Peran pimpinan dalam transformasi tata kelola kearsipan di lingkungan lembaga administrasi negara. *Jurnal Good Governance*, 67-79. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i1.748>